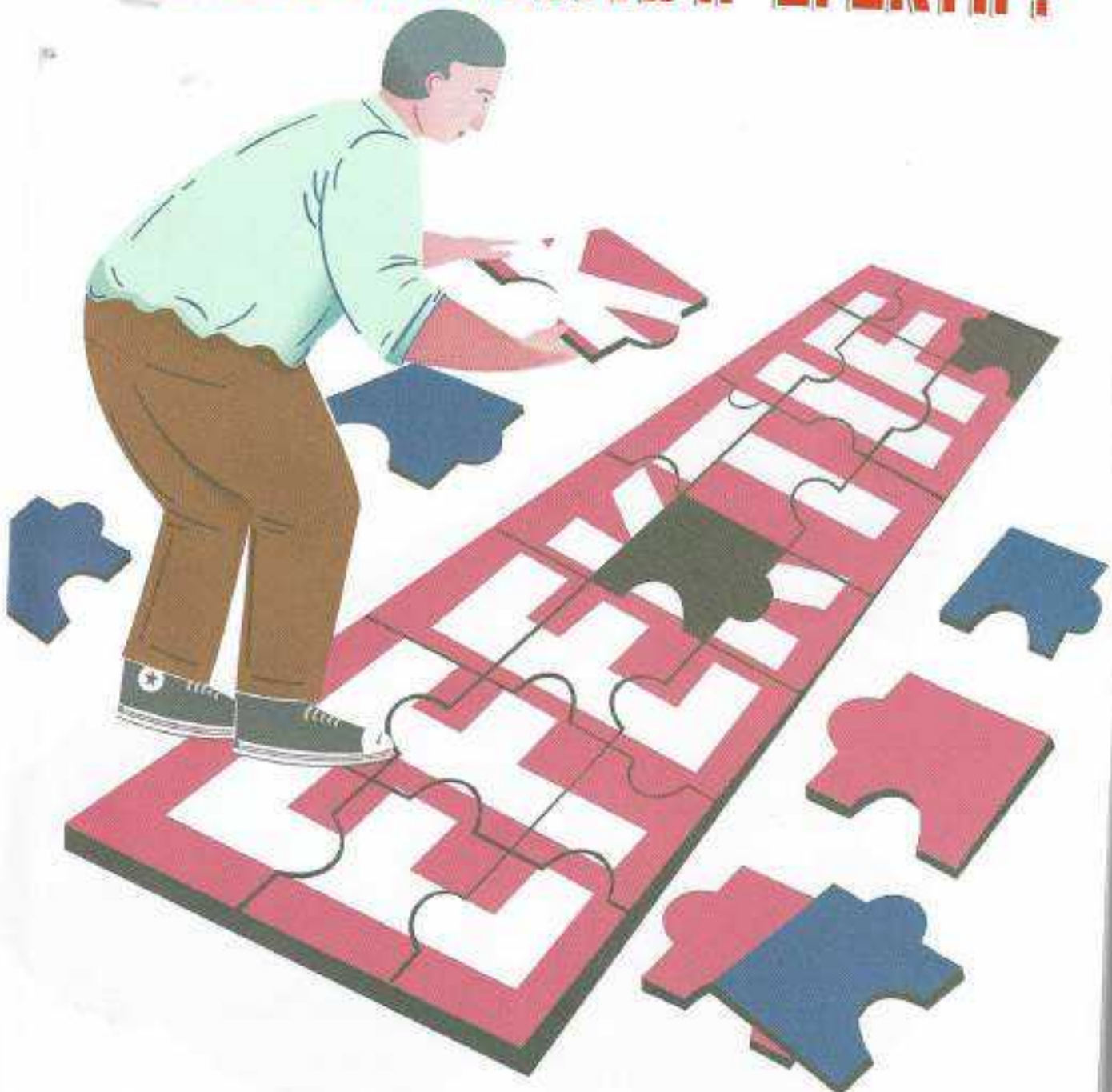


WARTA PENGAWASAN

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

MUNGKINKAH APIP EFEKTIF?

NOMOR 4/TAHUN 2017
ISSN: 0859-0519 - www.bakp.go.id



Membangun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif menjadi acuan tema edisi kali ini tak lain karena di tengah segala keterbatasan APIP selalu dinilai tidak efektif atas berbagai kasus maupun temuan di pemerintahan. Di sisi lain dua tahun menuju 2019, APIP dituntut meningkatkan kapabilitasnya di level 3 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah.

Redaksi menghadirkan beberapa narasumber dari pihak yang terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait lain. Potret dari berbagai sisi tersebut diharapkan dapat menggambarkan kondisi APIP sekarang dan agar lebih efektif.

Menjelang penghujung tahun, ada dua momen penting bagi redaksi Warta Pengawasan (WP). Pemimpin Umum WP yang juga Kepala Bagian Humas dan HAL BPKP Nuri Sujarwati mengakhiri kiprahnya sebagai Aparatur Sipil Negara, pensiun dini setelah kurang lebih tiga puluh tahun malang

melintang di pemerintahan. Posisinya kini digantikan Catur Iman Pratigny, sebelumnya menjadi Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan Nuri Sujarwati selama bertugas. Selanjutnya, salah satu kontributor WP, Kerneji Sormin mengakhiri masa lajangnya berjodoh dengan rekan satu angkatannya di BPKP, semoga menjadi keluarga yang berbahagia.

Pada akhirnya, membangun APIP yang efektif menjadi tugas bersama, serta harus dibangun dari nilai-nilai profesional, integritas, orientasi pengguna, nurani, dan akal sehat, independensi dan bertanggung jawab (PIONIR). Tidak kalah penting adalah kejujuran, seperti kata Kepala BPKP yang pertama kali era 1983-1993, Dr. Gandhi bahwa Mahkota Pengawasan adalah Kejujuran.

Mari bersama kita kembangkan APIP yang semakin efektif, sehingga kepercayaan publik terbangun dan pemerintahan menerima APIP sebagai solusi. Karena, memberikan keyakinan bagi pihak luar, khususnya bagi manajemen adalah hal utama bagi APIP. Semoga...



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax: 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103. **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 SIT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519. **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

WARTA PENGAWASAN

MUNGKINKAN APIP SPERTI



Ilustrasi Cover oleh : Nurul Ashari

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Peningkatan Kapabilitas APIP, Telaah Sejawat APIP
- 9 Peningkatan Kapabilitas APIP, Telaah Sejawat APIP
- 14 Independensi dan Obyektivitas: Peran APIP dalam memberikan Nilai Tambah bagi Kegiatan Instansi Pemerintah
- 18 Fungsi APIP: Jangan Seperti Kalau Hujan, Baru Cari Payung
- 21 Wakil Ketua KPK - Alexander Marwata, "Membangun Independensi Aparat Pengawas"

- 24 Irjen Kementerian Keuangan - Sumiyati, "Kiprah APIP Kementerian Keuangan"
- 28 Plt. Irjen Kemendagri - Sri Wahyuni, "Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah"
- 30 Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, "Membangun Kapabilitas APIP, Ujung Tombak Penguatan APIP"
- 34 Memandang Audit internal Pemerintah dari Perspektif Holistik

Nasional

- 38 BPKP Raih Penghargaan di Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017
- 40 APIP Mengawal Penerimaan Negara
- 43 Kerja Bersama dalam Persatuan
- 46 Wujudkan Good Governance dan Clean Government melalui Penerapan SPIP

Luar Negeri

- 49 Berbagi Pengalaman Penerapan Desentralisasi Fiskal

Manajemen Risiko

- 53 Meregulasi Penggunaan Media Sosial Pribadi Para PNS, Perluakah?

Warta Pusat

- 57 Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Millenial
- 61 Tingkatkan Kapabilitas Menuju Audit Berbasis IT

Warta Daerah

- 63 Rakordawas Riau: Pentingnya Komitmen dan Integritas

Kehumasan

- 66 Manajemen Isu, Suatu Keniscayaan Bagi Humas Pemerintah

Liputan Khusus

- 70 Sinergikan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP

Hukum

- 74 Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Korupsi

Keuangan Daerah

- 76 Hindari ini!!! Negative List dalam implementasi Siskeudes

Sosok

- 80 Selamat Jalan Sang Pengumandang Adzan

Susunan Redaksi

Pelindung : Kepala BPKP - **Pembina** : Sekretaris Utama - **Penasihat** : Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab** : Syaifuddin Tagamal - **Kontributor Ahli**: Malik, Heru Santoso, Priti Prabwi Bakri, Riyani Budiastuti, Achdiman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Edi Muzli, Miskudin Taufik - **Kontributor Tetap**: Mauro Nugroho, Heli Restiati, Setya Nugraha, Agus Yulani, Rini Wartini, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum**: Catur Iman Pratigny - **Wakil Pemimpin Umum**: M. Musahuddin - **Pemimpin Redaksi**: Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi**: Ratna Wijihastuti - **Redaktur Pelaksana**: Dony Perdana - **Redaktur**: Suyadiarto Priyono, Dian Setyawati, Diana Chandra, Nani Ulina K. N. - **Redaktur Foto**: Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi**: Hilwiya Agustine - **Reporter**: Suryo Cahyo Patro, Tri Sutrisno, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa, Karneji Sormin Sirogar - **Keuangan**: Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis**: Idris Zikra - **Administrasi**: Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi**: Edi Purnanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi**: Frans Sinaga, Gilang Rahmat Hastanto, Hanifah Adi Sasongko



Berbagi Pengalaman Penerapan Desentralisasi Fiskal

Medio Mei 2017 tim BPKP tergabung dalam tim Pemerintah Indonesia berperan dalam perhelatan yang diselenggarakan oleh Bank Dunia di New Delhi dan Calcutta, India. Acara yang bertajuk "South - South Knowledge Exchange on Leveraging Performance Based Financing and Improving Accountability for Local Government" merupakan ajang pertukaran pengalaman pelaksanaan desentralisasi fiskal antar negara berkembang Asia

Acara SSKE ini diikuti oleh delegasi dari negara Indonesia, India, Nepal, Srilanka dan Bangladesh. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan beberapa instansi yaitu BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat, serta Bappenas.

Bagi Indonesia, SSKE merupakan media untuk berbagi kisah sukses Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) di Indonesia dan melakukan pertukaran pengalaman terkait tiga isu desentralisasi, yaitu kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik, kerangka desentralisasi fiskal dan dana transfer, dan akuntabilitas, *monitoring* dan pelaporan pemerintah daerah dalam pelaksanaan



Delegasi BPP dengan Bank Dunia sebelum acara Knowledge Exchange di awal

desentralisasi fiskal. Kegiatan SSKE dilaksanakan dalam format dua hari diskusi dan satu hari kunjungan lapangan ke sebuah Gram Panchayat (level pemerintahan desa).

Berbagai sesi diskusi dalam acara ini memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara peserta SSKE, sekaligus memberikan masukan dan ide pengembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Keberhasilan P2D2 di Indonesia tidak lepas dari peran optimal BPKP sebagai *verification agent* yang bertugas memastikan *output* kegiatan memenuhi syarat untuk pencairan pinjaman.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara peserta SSKE berbeda – beda, sesuai dengan

struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan umum pelaksanaan desentralisasi di negara peserta SSKE adalah lemahnya akuntabilitas dan lemahnya *monitoring* dan pengawasan, baik oleh masyarakat maupun lembaga, serta kapasitas

pemda belum memadai. Akan sangat tepat jika pelaksanaan desentralisasi disertai dengan implementasi dan penguatan sistem pengendalian intern yang memadai. Perbandingan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Negara peserta SSKE pada Tabel 1.

Kunjungan lapangan ke Dolai Bazaar II Gram Panchayat mempelajari bagaimana praktik *performance for result* (PforR) dilaksanakan pada *Institutional Strengthening of Gram Panchayat* (ISGP). ISGP yang dibiayai *block grant*/dana alokasi umum telah mengimplementasikan persyaratan perlindungan sosial dan lingkungan melalui *Environment and Social Management Framework*



Kunjungan ke desa gram panchayat

(ESMF). Implementasi ISGP kurang lebih sama dengan P2D2 antara lain dalam hal jenis proyek, adanya mekanisme verifikasi, dan adanya persyaratan perlindungan social dan lingkungan.

Dari sisi pemerintah Indonesia, pelaksanaan SSKE memberikan manfaat antara lain kemungkinan diterapkannya pendekatan PforR dan penggunaan teknologi informasi dalam pemetaan *online* atas lokasi proyek. Penerapan PforR memungkinkan pemerintah dapat mengukur *outcome* kegiatan DAK Fisik, yang dalam P2D2 masih menerapkan *output based disbursement*. Sedangkan pemetaan *online* atas lokasi proyek antara lain dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan DAK Fisik terkait dengan pemetaan konektivitas di bidang jalan dan pemetaan lokasi sekolah di bidang pendidikan. *The next step* dari SSKE antara lain pembentukan forum diskusi antar negara peserta SSKE, penerbitan *verification handbook*, dan mendorong keberlanjutan program.

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)/Local Government Decentralization Project (LGDP)

Secara umum, P2D2 mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan DAK pada sektor infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi) di lokasi pemerintah daerah percontohan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelaporan keuangan dan teknis serta verifikasi *output* kegiatan infrastruktur yang dibiayai DAK. Untuk mencapai tujuan tersebut, P2D2 melaksanakan berbagai kegiatan yang terfokus pada 3 (tiga) hal yaitu:

DAK *Reimbursement* (Penggantian DAK) kepada pemerintah pusat untuk proyek infrastruktur di pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemenuhan persyaratan tersebut akan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain penggantian DAK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah percontohan akan diberikan insentif berupa dana sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari total



Kunjungan ke desa gram panchayat

DAK Infrastruktur jika pemda melaksanakan kegiatan DAK sesuai dengan petunjuk teknis dan melakukan pelaporan DAK kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum tepat waktu.

Penguatan institusi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengembangan sistem *monitoring* dan evaluasi untuk pelaporan *output* keuangan dan teknis yang berbasis internet. Untuk memperkuat operasional institusi, akan diberikan bantuan teknis dan pelatihan

kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk kepada BPKP sebagai verifikator. Kementerian Keuangan menyediakan dana untuk penguatan institusi.

Verifikasi *Output* yang dilaksanakan oleh BPKP untuk memastikan pemenuhan pelaporan teknis dan *output*, pemenuhan ketentuan pengelolaan keuangan, kesesuaian spesifikasi teknis *output* dan pemenuhan perlindungan sosial dan lingkungan. Pada awal tahun, BPKP akan mengompilasi harga satuan

output (Reference Unit Costs/ RUC) dari Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar penghitungan nilai penggantian (*reimbursement*). Untuk Pembayaran Awal (*Advance Payment*), BPKP akan memverifikasi data penyaluran DAK Tahap I dari Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 31 Maret. BPKP akan menyerahkan hasil verifikasi dan estimasi jumlah pembayaran awal kepada Kementerian Keuangan dan Bank Dunia.

*Penulis adalah Direktur Investigasi pada Deputi Investigasi

Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal pada Negara Peserta SSKE

Thema: Desentralisasi	Bangladesh	India	Indonesia	Nepal	Sri Lanka
Dasar hukum, awal implementasi	UID Bangladesh Tahun 1992 Implementasi tahun 1999	Amandemen UI tahun 1992 Implementasi tahun 1992	UID RI 1995 UU No. 23/1999 dan UU No. 15/1999 Implementasi tahun 2001	UID Tahun 2007 Implementasi tahun 1999	Amandemen 2003 UID tahun 1987 Implementasi tahun 2003
Struktur pemerintah daerah	Pencapaian: (a) <i>Panchayat</i> (b) <i>City corporation</i> Pedesaan: (a) <i>Urban parishad</i> (b) <i>Upa parishad</i> (c) <i>Para parishad</i> (d) <i>Para parishad</i>	Pencapaian: (a) <i>Zila Panchayat</i> (b) <i>Blok Panchayat</i> (c) <i>Gram Panchayat</i> Pedesaan: (a) <i>Mungel Corporation</i> (b) <i>Munichahly</i> (c) <i>Niger Panchayat</i>	Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa	Negara bagian dengan tiga tingkatan periode (pusat, provinsi dan periode)	<i>Pravindal</i> , <i>Munichal</i> , <i>Urban</i> , <i>Pravindal</i> , <i>Shahar</i>
Penyediaan pelayanan publik	Kewenangan pemda terbatas berbeda dengan pemda pedesaan.	Kewenangan pemda berbeda berbeda dengan pemda pedesaan.	Pemerintah pusat bertanggung jawab urusan pemerintahan tingkat - menengah. Perda bertanggung jawab urusan pemerintahan kabupaten.	Perdagangan, kewenangan dibedakan antara <i>Distrik</i> dan <i>village</i> .	Kewenangan dibagi di tiga tingkatan pemerintahan.
Akuntabilitas dan monitoring	Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pedesaan. Monitoring dilakukan oleh lembaga pemerintah tetapi tidak menyalak.	Akuntabilitas oleh <i>Finance Controller</i> dan akuntabilitas dibuktikan melalui audit.	Akuntabilitas ditunjukkan dengan 17 board, monitoring dilaksanakan lembaga pemerintah (jika kondisional dan organik).	Belum ada mekanisme yang memadai dalam rangka akuntabilitas dan monitoring.	Akuntabilitas dan transfer rendah, monitoring belum memadai.
Dana transfer	<i>Block grant</i>	<i>Block grant</i> , <i>base transfer</i> , <i>performance transfer</i>	DAU, DAK, DBH, ECU	<i>Revenue grant</i> , <i>subsidy grant</i> , <i>performance based grant</i> , <i>capital grant</i>	<i>Block grant</i> , <i>subsidy grant</i> , <i>social grant</i> , <i>benefit development grant</i> (1996)



Hari Pahlawan

10 November 2017

*...Mereka Melawan
Bukan untuk ketenaran
bukan pula untuk
kemasyhuran
tapi untuk kemerdekaan
dan kesejahteraan
Mereka adalah Pahlawan...*